



PERHUTANAN SOSIAL MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

*Webinar Optimalisasi Pengutaaan Ketahanan Pangan dan Energi: Mungkinkah?
Yayasan Sarana Wana Jaya (YSWJ)*

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial
Kementerian Kehutanan R.I

27 FEBRUARI 2025



PERHUTANAN SOSIAL SEBAGAI PERWUJUDAN ASTA CITA



Dorongan asta cita untuk menjawab isu-isu nasional terkait pemanfaatan yang berkelanjutan, keamanan pangan, energi, dan air

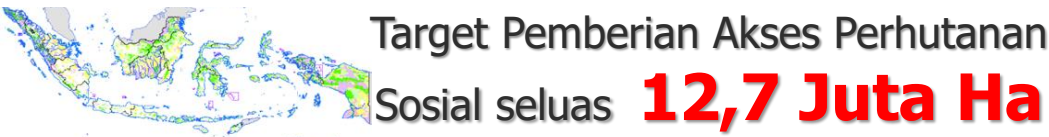
8 Misi (Asta Cita)

17 Program Prioritas

8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quickwins)



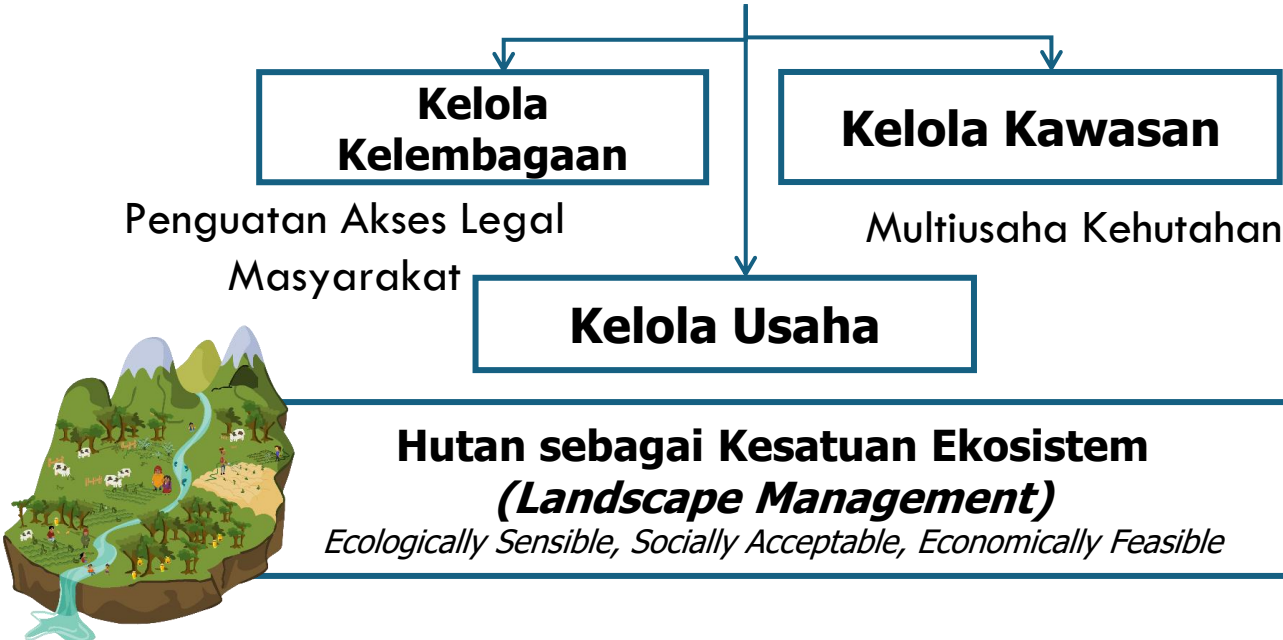
Sistem **pengelolaan hutan lestari** yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/ hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.



Kementerian Kehutanan pada Kabinet Merah Putih berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Perhutanan Sosial menjadi Program Strategis dalam mendukung Ketahanan/ Swasembada Pangan Nasional dan Energi Baru Terbarukan

Prinsip Pengelolaan Hutan Lestari



DASAR HUKUM

1. UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (**Pasal 29A & 29B**);
2. PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (**Bab IV**)
3. Permen LHK No 9/2021 tentang Pengelolaan PS;
4. Instruksi Presiden No. 4/2022 tentang Pecepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
5. Permen LHK No. 4/2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK;
6. Peraturan Presiden No. 28/2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
7. Kepmen LHK No 1091/2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial.



PERHUTANAN SOSIAL DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) “KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI MELALUI PERHUTANAN BERBASIS MASYARAKAT”

PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

Output

1. Mengoptimalkan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan lokal
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan
3. Meningkatkan kelestarian hutan melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat

Outcome

Meningkatnya ketahanan pangan di desa-desa di dalam dan sekitar kawasan hutan

Indikator

1. Kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang berkontribusi untuk ketahanan pangan
2. Jumlah produksi pangan dari kawasan hutan
3. Peningkatan nilai transaksi ekonomi pemanfaatan hasil hutan untuk pangan

Target Presiden yang Disasar

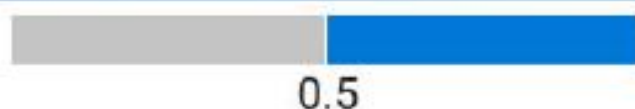
0%
kemiskinan

Indeks ketahanan pangan

Baseline 2025
76,20*

Target 2029
80,72

Lokasi



Diidentifikasi dari:

1. Tingkat kerawanan pangan
2. Kemandirian desa
3. Komoditas usaha KTH
4. Potensi lahan pangan di kawasan hutan



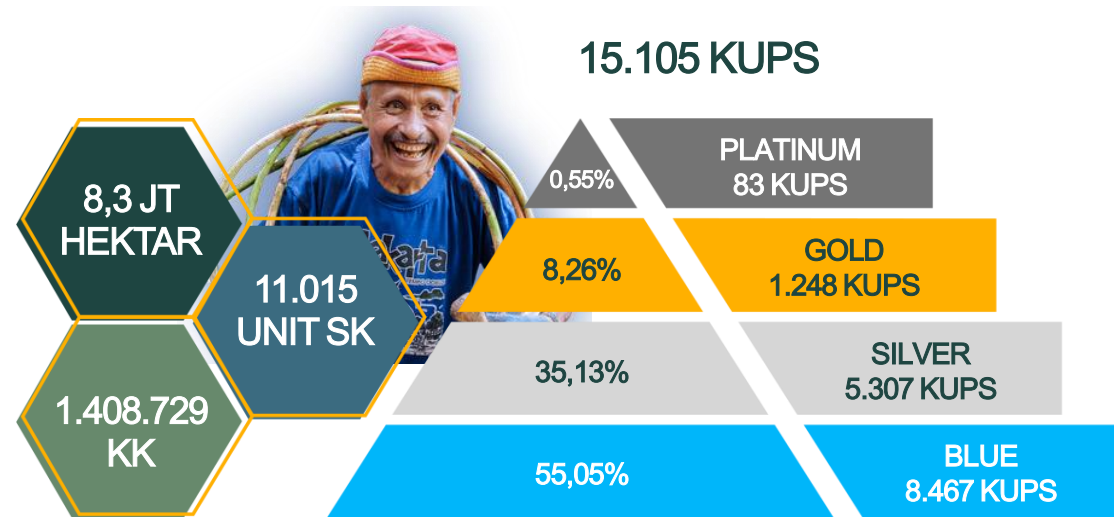
298 Kabupaten/Kota

2.250 Desa

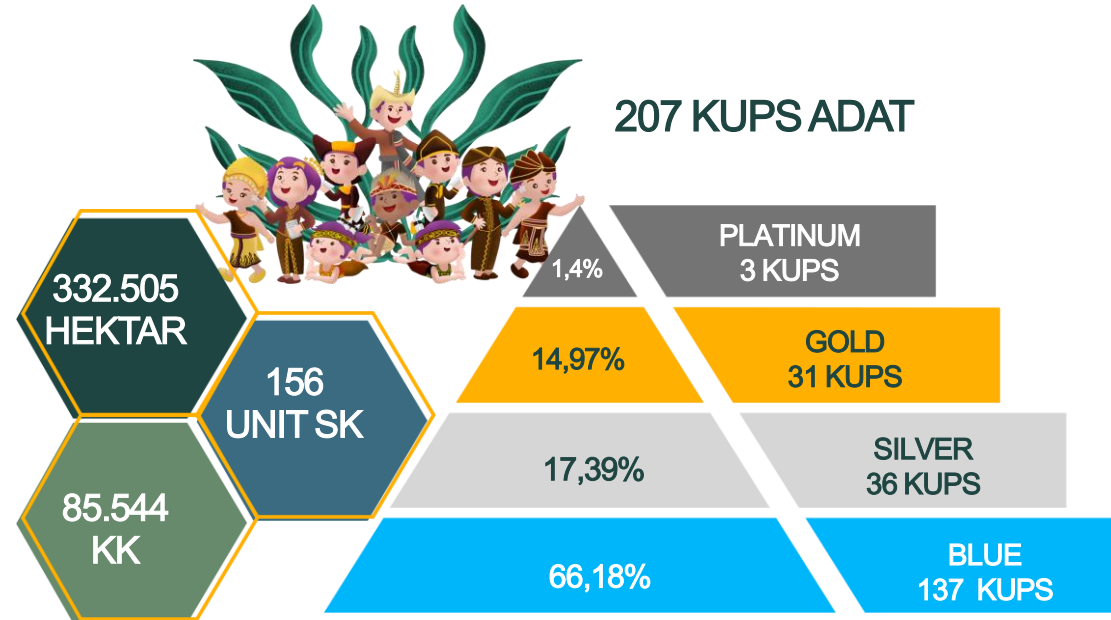
8.001 Kelompok

CAPAIAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL SD. FEBRUARI 2025

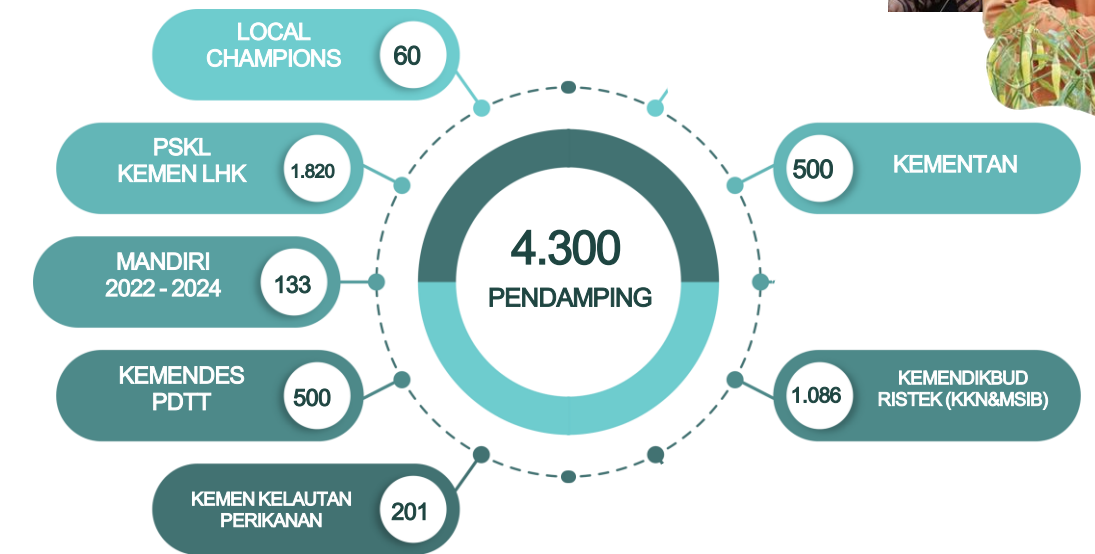
LUASAN & KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL



LUASAN & KELOMPOK USAHA HUTAN ADAT



CAPAIAN PENDAMPING PERHUTANAN SOSIAL



DAMPAK PERHUTANAN SOSIAL



A PENINGKATAN STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN DESA DENGAN PERHUTANAN SOSIAL

Pada tahun 2016-2023, dari 11.768 Desa dengan Perhutanan Sosial terjadi peningkatan status IDM pada desa dengan perhutanan sosial:

1. Desa sangat tertinggal berkurang dari 2.193 Menjadi 189 desa
2. Desa mandiri, meningkat semula 33 desa menjadi 1.803 desa

B DAMPAK SOSIAL

1. Tercipta peningkatan serapan tenaga kerja dan sumber mata pencaharian baru untuk meingkatkan pendapatan.
2. Perubahan perilaku dengan penurunan illegal logging, penurunan kebakaran hutan

C DAMPAK EKOLOGI

Pada Era PS 2016-2021, terjadi perbaikan kualitas tutupan lahan dan nilai stok Karbon (**±61,9 Juta Ton CO2e**) pada areal PS



Contoh : Gapoktan Wana Lestari, Lampung

E PENINGKATAN PENDAPATAN

Contoh di Sumatera Barat Pada Periode 2020 - 2023 terjadi peningkatan pendapatan KUPS dari rata-rata semula Rp.1.517.160,-/bulan (2020), menjadi Rp. 2.319.511,-/bulan (52,88%)



NILAI TRANSAKSI EKONOMI



IAD 48 KOTA/KAB



PRINSIP PELESTARIAN HUTAN

Sektor Kehutanan mendukung ketahanan pangan, energi, dan air melalui pola agroforestry, silvopastura dan silvofishery yang bertujuan meningkatkan produktivitas hutan sekaligus menjaga kelestarian hutan



PERHUTANAN SOSIAL

(Permen-LHK No. 9 Tahun 2021)

Sistem **pengelolaan hutan lestari** yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/ hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.



Pendekatan
landscape

Jangka Waktu

35
tahun



Kelompok
Masyarakat



Rencana
Kelola PS

Pilar	Kriteria	Indikator	Kunci Sukses
Sosial	Pembentukan Kelembagaan	- proses membuat Keputusan - Hak dan kewajiban masyarakat	- Mengurangi konflik - Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hutan
Ekologi	Pengelolaan Hutan	- Penggunaan lahan berdasarkan konsensus - Klaster komoditas (agroforestri, silvopasture, dan silvofishery)	- Perlindungan hutan oleh masyarakat - Agroforestri untuk meningkatkan stok karbon dan ketahanan pangan
Ekonomi	Bisnis Berbasis Komunitas	Kelompok Usaha legalitas badan usaha	- Akses terhadap peluang modal dan pasar - Peningkatan level Kelompok Usaha Perhutanan Sosial/Masyarakat Adat

// wujudkan hutan yang lestari, pembangunan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan rakyat yang pasti!



Hutan sebagai **sumber pangan dan energi** melalui pengelolaan yang berkelanjutan, sekaligus membantu pengentasan kemiskinan di sekitar hutan

TUJUAN

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL



KOMODITAS AGROFORESTRY KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL

KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)

adalah **Startup Perhutanan Sosial** yang merupakan kelompok usaha yang dibentuk oleh Kelompok Perhutanan Sosial yang akan dan/atau telah melakukan usaha, baik dalam pengelolaan HHK, HHBK, maupun Jasa Lingkungan yang salah satunya adalah ekowisata.

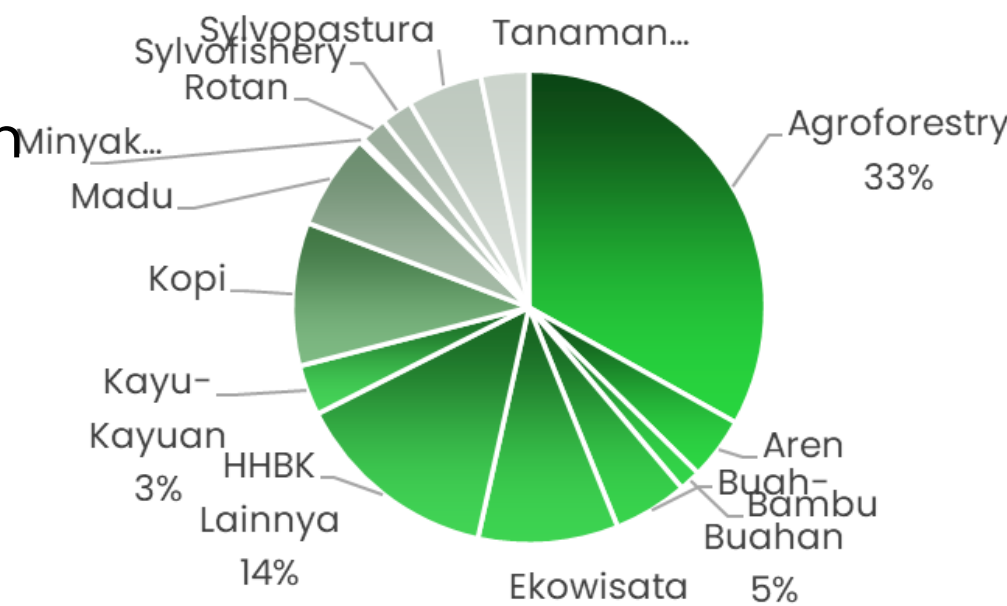


POTENSI KOMODITAS KUPS

Berdasarkan data **goKUPS**, sebaran komoditas usaha kelompok perhutanan sosial meliputi :

- HHBK (85,47%)
- Jasa Lingkungan (11,28%)
- HHK (3,25%)

JENIS KOMODITAS : 155 Komoditas



10 KOMODITAS TERBANYAK



ANEKA KOMODITAS PANGAN KUPS

NO	KOMODITAS	KUPS	KPS
1	Alpukat	29	26
2	Asam	1	1
3	Bawang Merah	4	3
4	Biji Kemiri	130	114
5	Biji Kopi	312	253
6	Biji-bijian Lainnya	7	7
7	Buah Naga	7	6
8	Buah-buahan/Umbi-umbian Lainnya	46	38
9	Cabai	35	34
10	Durian	58	51
11	Gula Aren	60	58
12	Gula Kelapa	26	24
13	Jagung	217	192
14	Jambu Mente	4	4
15	Jamur	9	9
16	Jengkol	34	27
17	Jeruk	16	14
18	Kacang	21	21
19	Kakao	59	56
20	Kapulaga	2	2
21	Kelapa	17	17
22	Kenari	2	2
23	Kentang	2	2
24	Klengkeng	2	2
25	Kopi Arabica	15	15

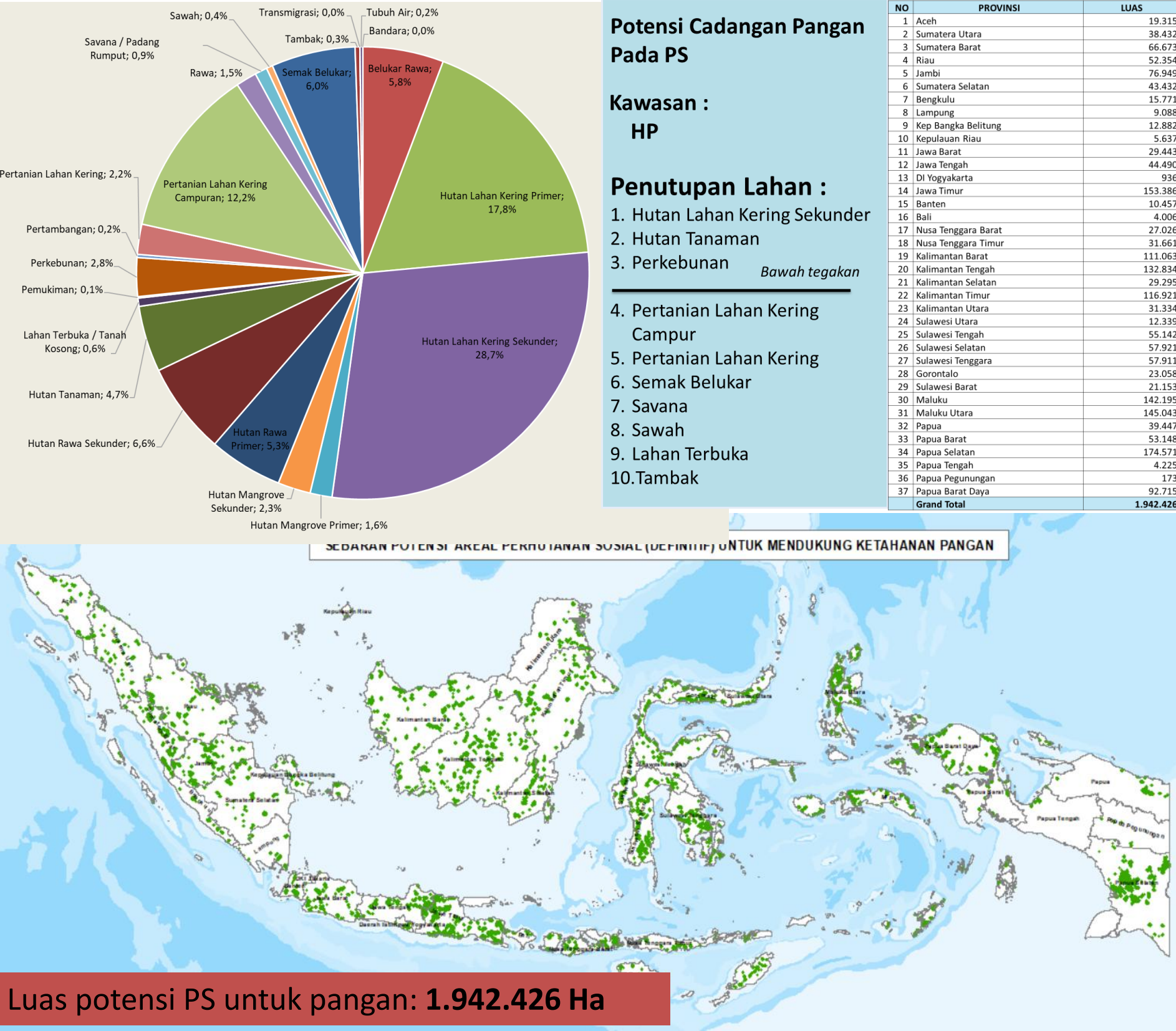
NO	KOMODITAS	KUPS	KPS
26	Kopi Robusta	35	34
27	Madu	279	258
28	Mangga	5	5
29	Manggis	11	11
30	Matoa	1	1
31	Melinjo	1	1
32	Minyak Astiri	10	9
33	Nangka	13	12
34	Nenas	6	6
35	Nira Aren	88	86
36	Padi (Gabah)	46	35
37	Pasak Bumi	1	1
38	Pepaya	4	4
39	Petai	10	7
40	Pisang	49	47
41	Rambutan	6	6
42	Resin Jernang	2	2
43	Sagu	9	9
44	Sawo	1	1
45	Singkong	25	21
46	Sukun	1	1
47	Talas	3	3
48	Tandan Buah Sawit	82	82
49	Tebu	1	1
50	Terong	6	5
51	Ubi Kayu	5	5
52	Umbi Porang	16	16
JUMLAH TOTAL		1,831	1,647



POTENSI AREAL PS MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

Luas Persetujuan PS Februari 2024 : 8.300.117,35 Ha

BERDASARKAN ANALISIS PENUTUPAN LAHAN PADA AREAL PERSETUJUAN PS



KESESUAIAN LAHAN AREAL PS (DEFINITIF & INDIKATIF)UNTUK KOMODITAS PANGAN

- Berdasarkan joint analisis kesesuaian lahan antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian,
- Komoditas yang dianalisis al. Padi, Jagung, Kedelai, Kakao, Kopi, Rumput gajah

No	Provinsi	Padi Gogo (Ha)	Jagung (Ha)	Kopi Arabika (Ha)	Kopi Robusta (Ha)	Cabai (Ha)	Kedelai (Ha)	Rumput Gajah (Ha)	Bawang Merah (Ha)	Kakao (Ha)
1	Aceh	29.617	46.422	7.429	47.630	30.467	30.467	46.422	30.467	65.207
2	Sumatera Utara	27.170	50.115	19.022	39.473	36.738	31.921	48.840	29.168	66.725
3	Sumatera Barat	12.169	24.108	5.579	22.691	12.236	12.236	24.108	12.236	41.450
4	Riau	57.960	40.882	37.579	40.526	40.600	40.602	40.870	40.600	42.248
5	Jambi	69.466	95.313	44.096	95.860	69.513	69.513	98.229	54.538	109.728
6	Sumatera Selatan	105.338	103.460	724	724	101.331	101.331	103.779	92.958	130.223
7	Bengkulu	308	386	85	386	310	310	386	310	386
8	Lampung	31.155	33.361	27.079	34.171	30.870	30.898	34.263	30.870	34.533
9	Kepulauan Bangka Belitung	45.753	46.527	21.104	47.629	44.965	45.099	46.527	44.965	46.751
10	Kepulauan Riau	12.299	19.392	-	19.332	12.316	12.316	19.389	12.316	32.340
11	Jawa Barat	34.709	39.395	25.671	38.946	34.778	34.778	39.395	27.009	43.028
12	Jawa Tengah	32.339	43.256	25.740	36.973	33.060	33.060	43.729	32.917	49.953
13	DI Yogyakarta	669	1.151	765	765	673	673	1.001	673	765
14	Jawa Timur	66.871	101.072	91.313	95.187	72.451	72.923	96.380	72.451	94.620
15	Banten	1.350	4.249	4.072	4.249	1.357	1.357	4.249	1.357	14.917
16	Bali	509	715	-	-	512	512	715	512	502
17	Nusa Tenggara Barat	4.702	6.819	6.553	6.553	4.690	4.690	6.819	4.690	19.925
18	Nusa Tenggara Timur	10.013	25.598	42.074	20.279	11.460	13.254	21.646	12.825	26.784
19	Kalimantan Barat	81.079	114.805	35.136	126.022	88.414	88.414	117.159	80.639	145.633
20	Kalimantan Tengah	137.837	197.563	75.636	201.083	162.061	162.348	202.871	148.836	211.829
21	Kalimantan Selatan	33.354	42.942	19.426	51.896	36.231	36.231	42.725	34.793	52.742
22	Kalimantan Timur	57.588	59.518	11.611	64.839	45.557	40.577	71.521	40.720	77.780
23	Kalimantan Utara	17.926	25.599	2.550	26.154	24.373	25.163	26.147	24.373	26.286
24	Sulawesi Utara	1.277	2.106	4.542	4.542	1.574	1.574	4.539	1.145	4.542
25	Sulawesi Tengah	12.060	25.166	18.800	34.512	9.474	12.069	33.321	4.968	39.178
26	Sulawesi Selatan	7.183	8.269	8.252	11.573	7.279	7.279	11.812	6.702	19.253
27	Sulawesi Tenggara	20.895	37.803	37.023	33.714	20.714	26.534	41.867	26.534	40.449
28	Gorontalo	901	3.173	2.907	3.545	904	904	3.386	904	3.316
29	Sulawesi Barat	1.648	1.897	1.897	1.897	1.651	1.651	1.897	1.651	5.664
30	Maluku	62.968	75.049	4.556	76.177	63.177	64.646	75.074	64.431	71.436
31	Maluku Utara	14.306	17.927	10.905	15.191	14.230	12.378	19.656	14.230	17.692
32	Papua	4.470	4.647	589	4.884	3.876	3.876	4.688	4.087	6.305
33	Papua Barat	18.830	21.683	752	21.642	21.028	20.280	21.683	20.280	22.096
34	Papua Selatan	98.195	95.225	-	36.588	94.011	94.011	53.648	94.011	53.648
35	Papua Tengah	1.149	2.665	-	2.665	1.146	1.146	2.665	1.146	2.672
36	Papua Pegunungan	3.267	3.812	2.240	3.617	3.272	3.272	3.414	1.370	4.982
37	Papua Barat Daya	28.009	36.704	23.538	38.937	30.199	19.439	36.704	19.439	37.427
TOTAL		1.145.338	1.458.774	619.245	1.310.852	1.167.498	1.157.731	1.451.524	1.091.117	1.663.012



POTENSI PENGEMBANGAN USAHA NIRA AREN KUPS MENDUKUNG ENERGI BARU TERBARUKAN



Kelompok Usaha Perhutanan Sosial/ KUPS Aren

Luas Potensi Aren Pada Areal Perhutanan Sosial :

• Luas Definitif	: 10.284 Ha
• Luas Indikatif PIAPS	: 99.538 Ha
• Luas Indikatif KHDPK	: 24.091 Ha
JUMLAH	: 133.912 Ha

Nilai Produksi KUPS Aren :

No	BPSKL Wilayah	JUMLAH KUPS	JUMLAH PRODUKSI (Kg)	NTE NIRA DAN GULA AREN SD. 2024 (Rp)
1	Sumatera	21	250.288	2.672.340.600
2	Jawa	3	2.052	107.868.000
3	Kalimantan	4	505	18.802.000
4	Bali dan Nusa Tenggara	5	11.179	203.525.000
5	Sulawesi	131	593,033	16.773.386.870
6	Maluku dan Papua	4	71.612	726.390.000
	TOTAL	168	593.873	20.502.312.470

Pemanenan dan Produk Aren :

- Kondisi penyadapan terbaik pada umur 6-9 tahun saat mayang bunga sudah keluar. Penyadapan dapat dilakukan pagi dan sore, setiap tahun dapat disadap 3-12 tangkai bunga dengan hasil rata-rata 6,7 liter/hari atau sekitar 900-1600 liter/pohon/tahun. (Litbang Perkebunan Kementan)
- Produk pohon aren: Ijuk , Lidi, Tepung Aren, Kolang-kaling, Nira



Agroforestry Aren

- Dengan pola **Agroforestry**, jarak tanam minimal adalah **4x10 meter**, Jalur dengan lebar 10 meter itu memanjang Timur-Barat. **Di jalur yang selebar 10 meter itulah ditanam tanaman sela semusim** dan bisa diperlebar hingga menjadi 4x12 meter.
- Untuk tujuan **Perlindungan** maka pola jarak tanam yang dianjurkan adalah 4x5 meter.
- Untuk taman **agrowisata**, pola jarak tanam adalah 5x10 meter.



Kerjasama Usaha

Contoh PKS



PT. Pertamina Subholding Power & New Renewable Energy (PNRE)



PT Indonesia Power



Ditjen PS/ Balai PSKL/ KUPS

Hilirisasi/Pabrik



Proses Pengolahan Nira Aren menjadi Bioetanol

KERJASAMA PENGEMBANGAN AGROFORESTRY TANAMAN ENERGI BIOMASA

1. Kerjasama dengan PT Cikarang Listrindo Tbk tentang Inovasi Sosial dan Lingkungan pada Program PS

- Dimulai 29 Desember 2023
- Luas agroforestry tanaman energi seluas 3.424 Ha (136,96% dari target 2.500 Ha)
- 14 KPS di Provinsi Jawa Barat dan Banten al. HKm KTH Wanareja Lestari, Gapoktanhut Hanjuang Sari (Sukabumi)
- Komoditi tanaman energi yang dikembangkan yaitu Akasia dan eucaliptus, komoditi tanaman MPTS yang dikembangkan yaitu Durian, Alpukat, Kopi.



2. Kerjasama PT. Paiton Energy dengan Kelompok Perhutanan Sosial di Jawa Timur

- Kelompok Tani Alam Subur dan Ranu Makmur di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo
- Total lahan perhutanan sosial seluas 750 hektar.
- Tanaman energi Kaliandra Merah
- Pendampingan dari Universitas Gadjah Mada





KENDALA

PENYIAPAN AKSES KELOLA KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL

- PEMBIAYAAN,
- MEMASTIKAN CLEAR AND CLEAN SUBJEK DAN OBJEK,
- TERDAPAT FREE RIDER

PENDAMPINGAN PERHUTANAN SOSIAL

JUMLAH PENDAMPING MASIH MINIM DIBANDINGKAN JUMLAH KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL

PENETAPAN HUTAN ADAT

- DUKUNGAN PEMDA DALAM PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) DALAM BENTUK PERDA BELUM OPTIMAL
- PEMBIAYAAN.

01

02

03

04

05

06

PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL

KUPS PADA TINGKAT BIRU/PEMULA, MASIH BANYAK (BARU MENDAPATKAN PERSETUJUAN PS)

PENDANAAN PERHUTANAN SOSIAL

PENDANAAN PRA – PASCA PEMBERIAN PERSETUJUAN PS, PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

PENGEMBANGAN PANGAN

- PENYEDIAAN SAPROTAN
- LOKASI REMMOTE AREA
- INFRASTRUKTUR
- PEMILIHAN METODE BERKELANJUTAN
- SEMULA SUBSISTEN – SKALA EKONOMI
- KAPASITAS



SOLUSI



MENINGKATKAN PERAN POKJANAS PERHUTANAN SOSIAL DAN POKJA PROVINSI SERTA OPD PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DI TINGKAT TAPAK.



MENDORONG IMPLEMENTASI PERPRES 28 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN TERPADU PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL, YANG MEMAYUNGI SINERGI KOLABORASI PARA PIHAK/PENTAHELIX (K/L, PEMDA, CSO, DUNIA USAHA, PT, MEDIA MASA, DLL) DALAM MENDUKUNG PERHUTANAN SOSIAL (PEMBERIAN AKSES KELOLA, PENGEMBANGAN USAHA DAN PENDAMPINGAN



- PERAN CSO/PILANTROPI DALAM MENDORONG PENETAPAN PERATURAN DAERAH PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA)
- PEMBENTUKAN SATGAS PERCEPATAN HA



- MENDORONG PENETAPAN CPCL KEMENTERIAN TERKAIT (KEMENTAN, KEMENKOP, KEMENDES, DLL)
- PENYUSUNAN REGULASI : INPRES PANGAN. PEDOMAN TEKNIS AGROFORESTRY PANGAN
- MENGEFEKTIFKAN PENDANAAN IKLIM (RBP/RBC) UNTUK INVESTASI AGROFORESTRY PANGAN
- INOVASI DAN TEKNOLOGI
- PENDAMPINGAN



PERENCANAAN TERPADU PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL MELALUI INTEGRATED AREA DEVELOPMENT DAN PENGEMBANGAN USAHA TEMATIK (PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2023)

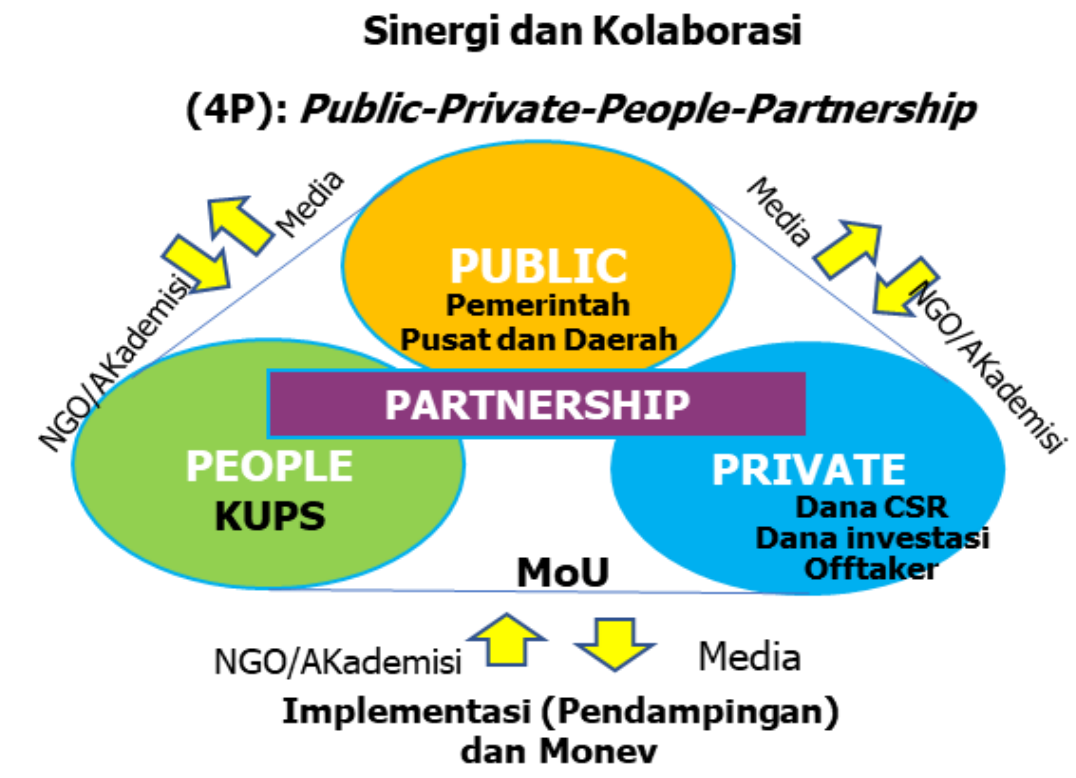
IAD merupakan integrasi/kolaborasi program Pemerintah Daerah dalam bentuk Rencana Aksi yang disusun dan ditandatangani oleh Pimpinan Daerah (Bupati/Walikota).

IAD sebagai salah satu strategi pendekatan perhutanan sosial yang terintegrasi tidak hanya dari segi sosial, melainkan juga ekonomi dan ekologi dengan melibatkan para pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan tujuan:

- Peningkatan Skala Ekonomi Desa/Masyarakat Di Sekitar Hutan
- Peningkatan Nilai Produk
- Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah Yang Saling Terkoneksi
- Pengembangan Sentra Pasar Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- Menjaga Kelestarian Hutan Berkelanjutan (SFM)
- Peningkatan Tutupan Hutan

Keberhasilan PS di masa depan

1. Penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor;
 2. Pengalokasian anggaran untuk Perhutanan Sosial;
 3. Mendorong kolaborasi dan sinergi para pihak
 4. Mengintegrasikan Perhutanan Sosial ke dalam RPJMN/RPJMD
- Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah



PENGEMBANGAN USAHA TEMATIK

Strategi percepatan pengembangan usaha tematik merupakan pengembangan usaha spesifik yang dilaksanakan melalui koordinasi dan/ atau integrasi program kegiatan antarkementerian/lembaga, Pemerintah **Daerah Provinsi**, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan pihak terkait.



Swasembada Pangan Nasional melalui Kluster Komoditas tiap Provinsi/Kabupaten

50 KABUPATEN/KOTA TELAH MENGINISIASI IAD BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL

No	Tahapan	Kabupaten / Kota	
1	Dokumen renaksi IAD telah disahkan dan diimplemen- tasikan	27	• 2 Kabupaten Tahap Implementasi (Lumajang dan Belitung) • 8 Kabupaten Sudah Diseminasi Dok Renaksi IAD Tingkat Nasional (Ngada, Kapuas Hulu, Sintang, Poso, Maros, Enrekang, Bulungan, Buleleng) • 17 Kabupaten Perlu Diseminasi Tingkat Nasional (Berau, Ketapang, Sikka, Kotawaringin Barat, Lima Puluh Kota, Dompu, Lampung Selatan, Timor Tengah Selatan, Pesawaran, Sanggau, Kab Bima, Halmahera Barat, Kota Bima, Madiun, Garut, Kutai Timur, Kotabaru)
2	Tahap penyusunan dan finalisasi dokumen Renaksi IAD	5	• Ogan Komering Ilir, Lombok Tengah, Hulu Sungai Utara, Banjar, Pulang Pisau
3	Tahap sosialisasi IAD	18	Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir, Pesisir Selatan, Karawang, Jembrana, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Pahuwato, Sigi, Bulukumba, Luwu Utara, Ternate, Halmahera Utara, Mimika, Bone

Dokumen IAD yang telah disahkan dapat diunduh pada https://bit.ly/Renaksi_IADPS

Selain sinergi para pihak melalui IAD Berbasis Perhutanan Sosial, saat ini juga tengah didorong Pengembangan Usaha Tematik (Pangan, Energi Baru Terbarukan, Pariwisata, RHL, Agroforestry, dll) melalui *Integrated Forest Farming Development* (IFFD) untuk skala Provinsi dengan model pertama dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Peran K/L Terhadap Pengembangan Usaha Tematik, Produktivitas pada Areal Perhutanan Sosial

No.	Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan
1	Kementerian Kehutanan	☐ Bantuan bibit RHL dalam areal PS dan areal PS bisa menjadi lokus RHL (DAS RH) ☐ Fasilitasi SIPUHH (Ditjen PHL) ☐ Komitmen perlindungan keanekaragaman hayati pada Kawasan hutan (Ditjen KSDAE) ☐ Pelatihan penyusunan RKPS, pendamping lulusan SMK Kehutanan (Lulusan SMK Kehutanan, BP2SDM) ☐ Areal PS menjadi kampung iklim (Ditjen PPI) ☐ Kemitraan konservasi akan dicatatkan menjadi kemitraan kehutanan
2	Kementerian Dalam Negeri	Integrasi Perencanaan Anggaran Daerah untuk Perhutanan Sosial (SIPD)
3	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	☐ Penyusunan Juknis Pemanfaatan Dana Desa untuk Perhutanan Sosial dan Permendes PDTT tentang Dana Desa ☐ Kerjasama BUMDesa dengan Perhutanan Sosial dalam bentuk PKS ☐ Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)
4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	☐ Program Kawasan Ekonomi Khusus ☐ Shelter Tourism di Lokasi Perhutanan Sosial
5	Kementerian Koperasi dan UMKM	Program untuk mendorong penguatan kelembagaan KUPS untuk menjadi Koperasi UMKM
6	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Pemulihan Penghidupan masyarakat pasca bencana kebakaran hutan dan lahan di Areal Perhutanan Sosial
7	Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup	Pendanaan Program Hibah dan Dana Bergulir
8	Kementerian Pertanian	Bantuan bibit, tanaman hortikultura, Kebijakan Pupuk subsidi untuk LMDH dan KUPS dan Bantuan Saprodi
9	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek	KKN Tematik dan Program MBKM tema PS, Program MSIB
10	Kementerian Tenaga Kerja	Pengembangan model Program PKK berbasis Kawasan
11	BUMN/S	Offtaker produk Perhutanan Sosial, Pendamping
12	HIMBARA	CSR dan Pinjaman KUR

K/L Mendukung Swasembada Pangan

SINERGI KOLABORASI PARA PIHAK MELALUI INTEGRATED AREA DEVELOPMENT (IAD) BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL

(Pasal 12-13 Perpres 28 Tahun 2023)

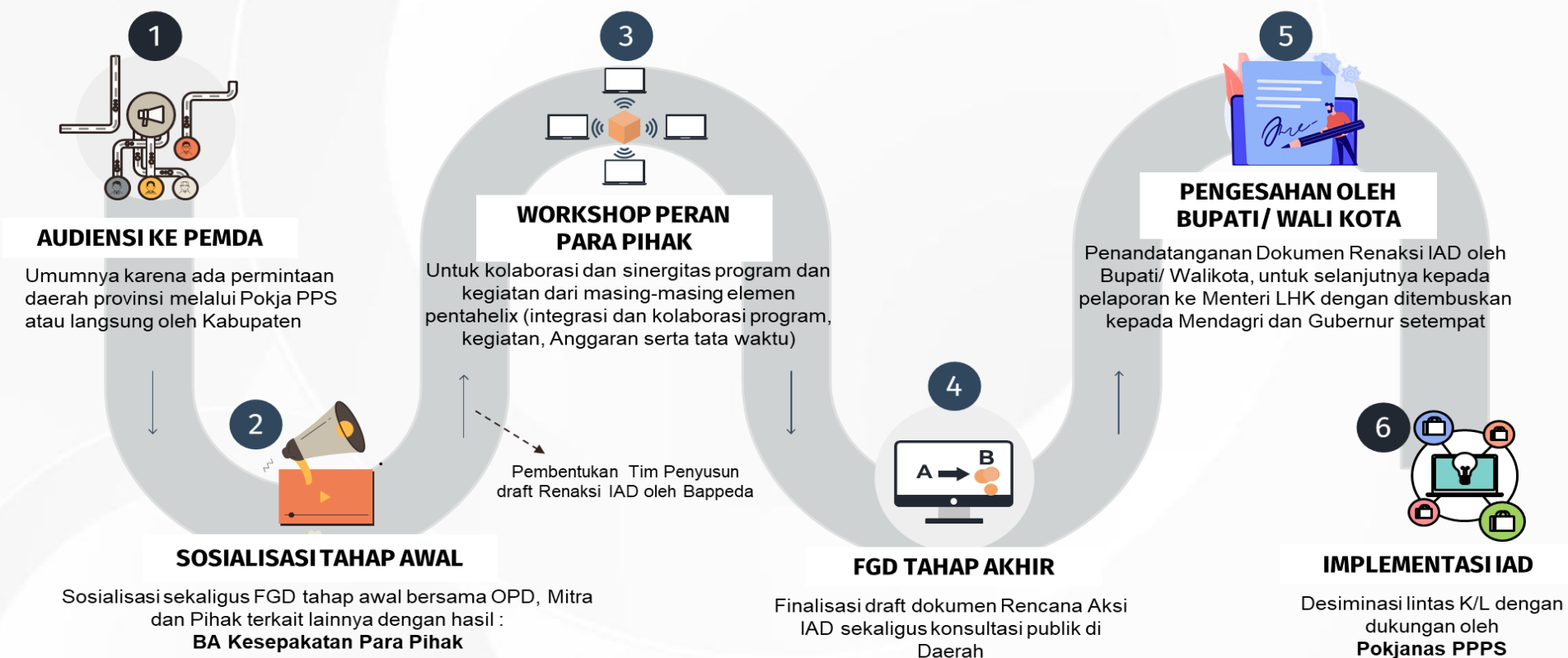
IAD merupakan integrasi/kolaborasi program Pemerintah Daerah dalam bentuk Rencana Aksi yang disusun dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah.

Bappeda Memiliki Peran Penting dalam Implementasi Kebijakan dan Monitoring Pelaksanaan IAD

SINERGI PERAN PARA PIHAK DALAM MENDUKUNG IAD



TAHAPAN PERANCANGAN IAD BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL



49 KAB/KOTA TELAH MENGINISIASI IAD BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL

No	Tahapan	Kabupaten/Kota	
1	Dokumen renaksi IAD telah disahkan dan diimplemen-tasikan	20	• 2 Kabupaten Tahap Implementasi (Lumajang dan Belitung) • 8 Kabupaten Sudah Diseminasi Dok Renaksi IAD Tingkat Nasional (Ngada, Kapuas Hulu, Sintang, Poso, Maros, Enrekang, Bulungan, Buleleng) • 10 Kabupaten Perlu Diseminasi Tingkat Nasional (Berau, Ketapang, Sikka, Kotawaringin Barat, Lima Puluh Kota, Dompu, Lampung Selatan, Timor Tengah Selatan, Pesawaran, Sanggau)
2	Tahap penyusunan dan finalisasi dokumen Renaksi IAD	8	• Ogan Komering Ilir, Lombok Tengah, Kab Bima, Kota Bima, Halmahera Barat, Kutai Timur • Model IAD Skala Provinsi : Provinsi DI Yogyakarta (Kulon Progo dan Gunungkidul) : Interkoneksi Wisata dan Penguatan Kelembagaan KUPS
3	Tahap sosialisasi IAD	21	Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir, Pesisir Selatan, Garut, Karawang, Madiun, Jembrana, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Pulang Pisau, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Pahuwato, Sigi, Bulukumba, Luwu Utara, Ternate, Halmahera Utara, Mimika, Bone

Lokasi Pengembangan Wilayah Terintegrasi Berbasis Perhutanan Sosial di Kabupaten Lumajang

Penanggung Jawab Program: Menteri LHK
Project Management Unit (PMU): Bupati Lumajang

SUB PROGRAM 1 AGROSILVOPASTURA

(Integrasi Agroforestry dan Silvopastura)
Penanggung Jawab: Kementan, KLHK, Pemda Lumajang



SUB PROGRAM 2 AGROINDUSTRI

Pengembangan Agroindustri (kopi, susu sapi, kripik pisang, dan kripik talas)
Penanggung Jawab: KemenkopUKM, KemendesPDTT, Kemenperin, Kementan, KLHK, Pemda Lumajang

SUB PROGRAM 3 INTERKONEKSI WISATA

Pengembangan Wisata Alam (Siti Sundari, Ranu Pani, Agrosari, dan Glagaharum)
Penanggung Jawab: KLHK, Kemenparekraf, KemendesPDTT, Perum Perhutani, Pemda Lumajang

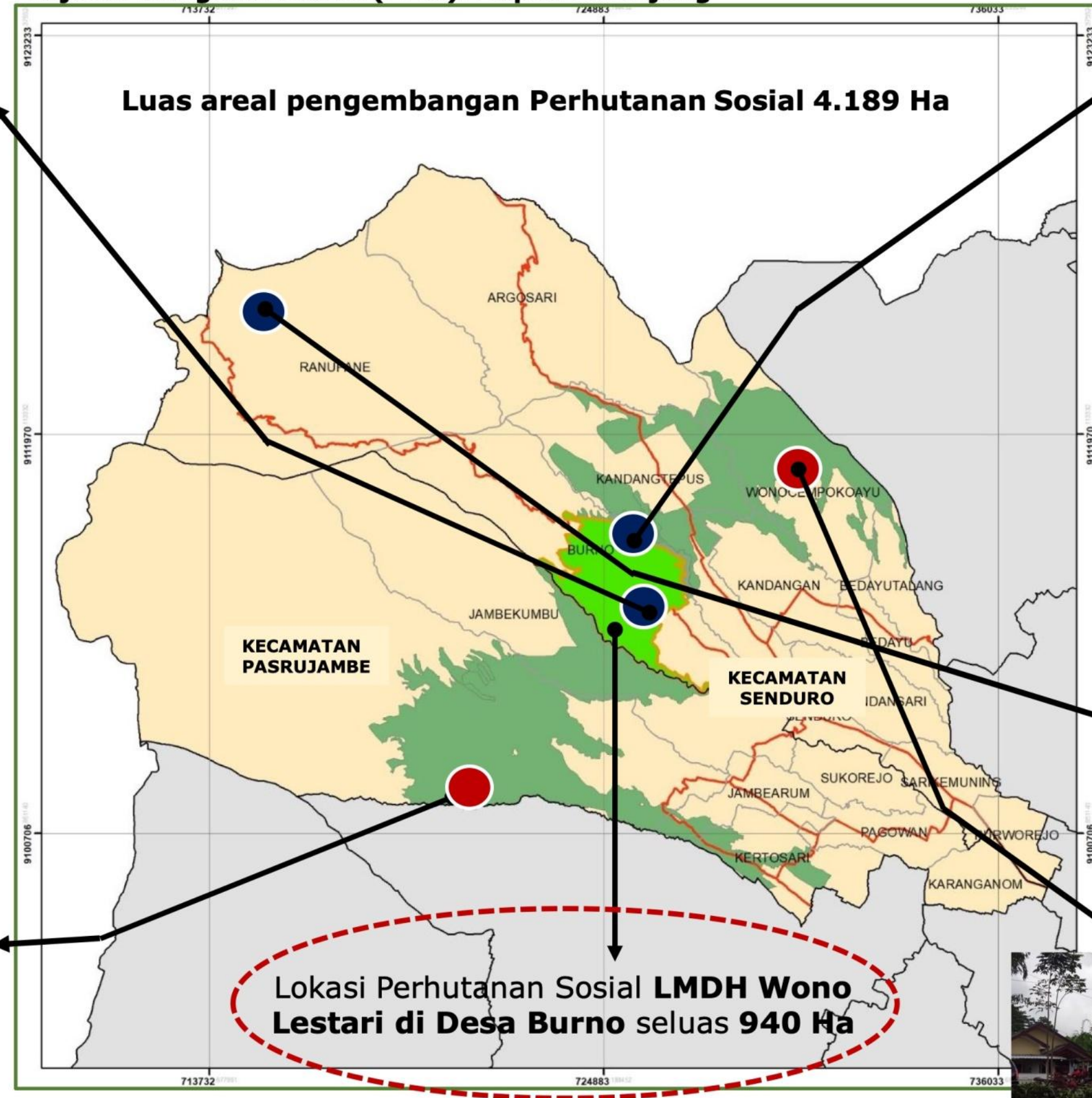


SUB PROGRAM 3 PEMULIHAN DANAU BERBASIS AGRIKULTUR

Pemulihan Ekosistem Danau (Kawasan Ranu Pani)
Penanggung Jawab: Kementan, KLHK, KemenPUPR, Kemensos, Pemda Lumajang

SUB PROGRAM 5 AKSES HUTSOS DAN REDISTRIBUSI LAHAN

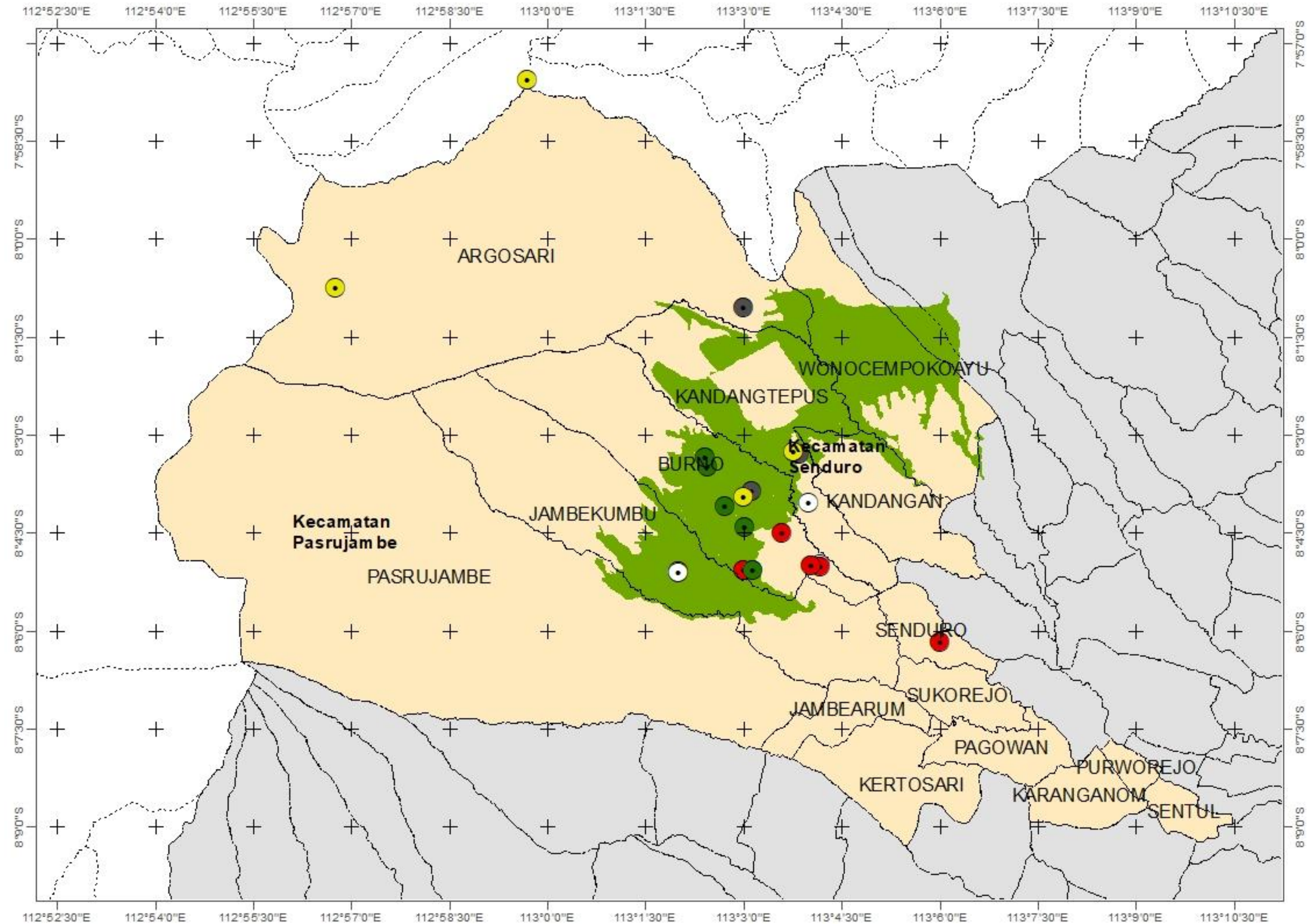
Penanggung Jawab: KLHK, KemenATR, Dishut Provinsi Jatim



Lokasi Perhutanan Sosial **LMDH Wono Lestari** di Desa Burno seluas **940 Ha**

LOKASI PENGEMBANGAN WILAYAH TERINTEGRASI BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL DI KABUPATEN LUMAJANG

-  Sentra Produk Olahan
(kopi, susu sapi, susu kambing kripik pisang, dan kripik talas, pasar sentra komoditi)
-  Kandang Sapi
(Skal Industri dan Komunal)
-  Kandang kambing
(Skala Industri dan Komunal)
-  Agroforestry
(kopi, pisang, talas, porang, kapulaga, lebah madu, HMT)
-  Pengembangan Kawasan Wisata
(Ranupani, argosari, glagaharum, siti sundari)





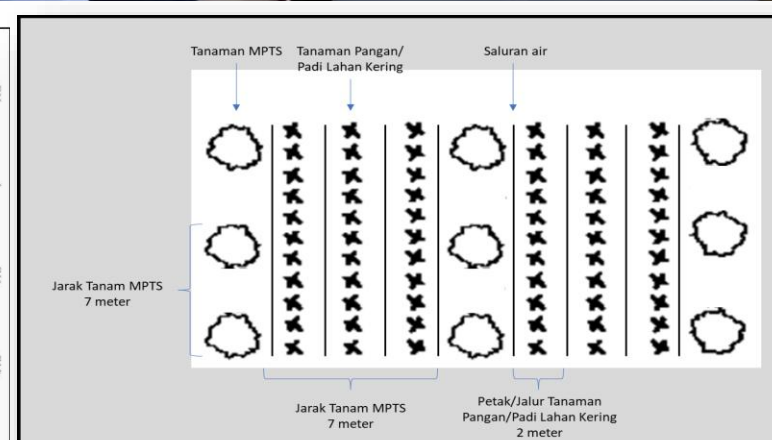
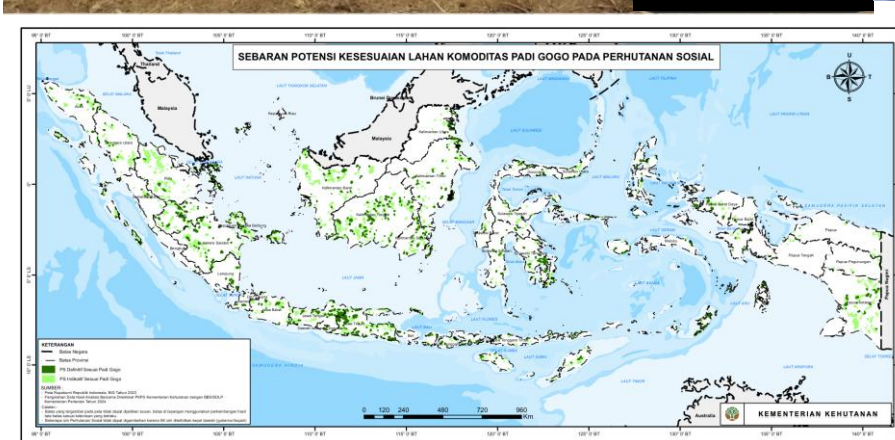
PENANAMAN SERENTAK AGROFORESTRI PANGAN PADI LAHAN KERING DAN MPTS BERSAMA MENTERI KEHUTANAN DAN PERTANIAN



4 Februari 2025

Penandatanganan MoU sinergi K/L mendukung swasembada pangan

- Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk sinergitas Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian untuk mendukung program Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan Indonesia.
- Pola penanaman secara agroforestri dengan meningkatkan produktivitas dan memulihkan kondisi lahan yang terbuka akibat bencana alam, kebakaran, dan illegal logging.
- Lahan yang terbuka akan direhabilitasi oleh Pohon Kehutanan atau MPTS untuk mengembalikan fungsi ekologi tanahnya dan budidaya tanaman pangan atau tanaman semusim di sela-sela tanaman kehutanan



- Penanaman serentak agroforestry tanaman kehutanan dan tanaman MPTS (mangga, petai, alpukat, durian, dll) dengan padi lahan kering (varietas IPB9G, Mekongga, INPAGO13, JONGONE, MAPAN P-05, dll) di berbagai wilayah Indonesia sebanyak **26 lokasi** di **21 provinsi** dengan rincian: 6 (enam) regional Balai PSKL, 3 (tiga) regional wilayah kerja Perum Perhutani dan 17 (enam belas) Kabupaten lainnya di luar kawasan hutan yang tersebar di seluruh Indonesia seluas **122 Ha** sebagai kick-off.



- Potensi penanaman tanaman pangan perhutanan sosial (padi, jagung, dan tanaman pangan lain pada areal perhutanan sosial) dapat dilakukan sampai seluas **1,1 juta Ha**. Pada tahap pertama dilakukan penanaman seluas $\pm 111.176,18$ Ha di areal Perhutanan Sosial dan ditambah penanaman di areal Perhutani $\pm 30.056,7$ ha sehingga total **141.232,88 Ha**.



Terima Kasih